

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Kemiskinan semakin menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja, ada dua kategori kemiskinan, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan adalah kehidupan nyata mereka setiap hari karena mereka merasa hidup dalam kemiskinan. Jika Anda membandingkan kehidupan dengan kehidupan orang lain dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi, mereka akan merasakan kesadaran akan kemiskinan. (Rosana, 2019)

Kemiskinan yang dimaksud di sini bukanlah kemiskinan yang dialami seseorang karena malas bekerja atau sakit sepanjang waktu. Kemiskinan ini bersifat individual, bukan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan sekelompok orang karena struktur sosial masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam penggunaan sumber-sumber pendapatan yang benar-benar tersedia bagi mereka.

Menurut John Friedmann, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, termasuk: modal produktif atau aset tanah, rumah, peralatan; Sumber pembiayaan (pendapatan dan kredit yang cukup); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama (partai politik, koperasi dan lain-lain); Jaringan atau jejaring sosial untuk mendapatkan pekerjaan. (Bayo, 1996: 4) Gejala kemiskinan ini muncul karena negara-negara kaya di dunia, yang setiap tahun memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-

negara berkembang, takut. Karena bantuan yang mereka berikan sangat menguntungkan kelas penguasa, tetapi para penguasa sangat sedikit memberikan manfaat pada golongan miskin ; padahal golongan miskin inilah yang lebih memerlukan bantuan . Kejadian yang demikian ini dianggap tidak adil. (Soemardjan, 1984) Memang kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan kekurangan pangan saja, melainkan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia di sekitarnya, bahkan sering juga kekurangan perlindungan dari hukum dan pemerintah. Dalam keadaan tingkat kemiskinan seperti ini, pemerintah menduduki posisi yang paling mampu mengusahakan perubahan.

Menanggapi kenyataan-kenyataan ini pemerintah tidak berarti berdiam diri penyebaran sekolah-sekolah dan puskesmas samapi ke kecamatan-kecamatan terpencil dan proyek-proyek listrik masuk desa, merupakan usaha pemerataan. Dalam hal lain mengadakan langkah-langkah yang khusus dimaksudkan untuk membantu para pengusaha kecil dari golongan menengah dan bawah untuk membangun usahanya. Kredit Investasi Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen, diluncurkan. Tetapi meskipun yang dapat dibantu secara efektif dengan langkah-langkah itu nampak jelas namun golongan miskin struktural yang tidak mempunyai usaha tidak dapat menggunakan sumber kredit tersebut. Di bidang pendidikan dasar pun pemerintah berusaha untuk membuka kesempatan bagi masyarakat seluas mungkin untuk mengirim anak-anak sekolah. Sumbangan Pemeliharaan Pendidikan (SPP) dihapuskan. Namun keringanan yang sebenarnya berarti besar itu tak dapat dinikmati pula oleh golongan miskin struktural, diluar SPP dalam praktek masih ada pembiayaan-

pembiayaan bagi anak sekolah yang tidak dapat dipikul oleh orang-orang golongan itu.(Bayo, 1996 : hal 10)

Ketidak-adilan struktural dan kedaulatan hukum dalam Perkembangan sistem hukum nasional pun belum ditandai oleh arah yang mendekatkan hukum pada tujuannya yakni keadilan dan bekerjanya hukum dalam kenyataan sangat sering melembagakan keseluruhan struktur ketidak-adilan. Masih terdapat aturan-aturan hukum yang memperkokoh ketergantungan ekonomi, yang memperkuat kepemilikan, perampokan dan pengendalian sumber daya masyarakat atau atau perampasan hak-hak rakyat untuk melegitimasi ragam kekuasaan. (Manifesto, 1979) Posisi perpihakan hukum kian jelas oleh tindak-tanduk elite pengembala hukum yang menyelenggara kan hukum secara selektif, serta secara administratif bahkan mengesahkan langkah-langkah korup serta perilaku lain untuk pendukung kesenjangan-kesenjangan yang dihayati sebagai ketidakadilan. Kalau demikian halnya, maka tegaknya asas kedaulatan hukum guna menghapuskan ketidak-adilan struktural sangat tergantung pada keinginan-keinginan dan sumber daya penguasa.

Persoalan mengapa pengadaan sumber-sumber daya dan pelayanan sosial yang lebih besar baik di dalam rangka usaha pemerataan kita sekarang ini maupun sebelumnya, sering sekali tidak sampai kepada golongan miskin mutlak, kesimpulan bahwa kesulitan untuk mencapai golongan yang paling miskin ada hubungannya dengan pola organisasi sosial dan dengan pola pengaturan institusional di daerah pedesaan.Sangat diperlukan organisasi-organisasi yang dapat meningkatkan kemampuan desa, termasuk golongan miskin, untuk mengatur diri sendiri, dalam hubungannya dengan keperluan-keperluan tertentu, seperti pengelolaan irigasi, pengurusan lumbung desa,

pemasaran dan pengkreditan. Intinya adanya organisasi di dalam desa ialah sarana untuk mengurangi ketimpangan dengan memberi kesempatan untuk proses belajar. (Bagong, 2019) Masyarakat mulai berorganisasi harus belajar untuk mengelola diri sendiri, tapi sebaliknya aparat pemerintah pun harus belajar untuk hidup bersama dengan organisasi-organisasi baru dengan cara mendukung dan merangsang perkembangannya, tanpa merusak dengan pengaturan yang mengekang. Membantu dan menyusun kekuatan berorganisasi golongan lemah dan miskin sudah barang tentu bukan satu satunya perubahan dalam pola struktural masyarakat desa. Misalnya pola pemilikan dan penggunaan tanah serta pola bagi hasil. Pola pemilikan tanah erat hubungannya dengan pola pembagian kekuatan dan struktur kekuasaan di desa. Golongan yang paling miskin dihiraukan atau dilayani kepentingannya, dan sejauh mana mereka mendapat bagian dari peluang-peluang baru itu. Jelaslah bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin. Pola ketergantungan, Pola kelemahan dan eksploitasi golongan miskin berkaitan juga dengan pola organisasi institusional pada tingkat nasional dan international. Pola- hierarki di dalam suatu masyarakat, pola diskriminasi, pola-pola ketergantungan yang timpang dalam pembagian kekuatannya dan yang eksploitatif sifatnya, semua ini pola struktural. Ketimpangan-ketimpangan struktural ini mau tak mau harus dihadapi secara langsung untuk mengatasinya dengan usaha pembangunan daerah, usaha pembangunan daerah pedesaan, dan peningkatan kesempatan kerja sebagai suatu tujuan utama strategi pembangunan.

Dalam REPELITA III kebijakan Presiden Soeharto 16 Agustus 1978 di depan sidang DPR, memberikan pemerataan sudah menjadi suatu tujuan

strategi pembangunan dan meningkatkan kesempatan kerja yang utama, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, karena hingga kini kemampuan kita untuk menurunkan pengangguran ternyata sangat terbatas. Kebijakan makro itu juga meliputi masalah tanah, yaitu pemilikan tanah, penguasaan tanah, penggunaan tanah serta pengaturan-pengaturan intitusional mengenai tanah, seperti pola bagi hasil dan pola pewarisan tanah. Bagaimanapun, kegiatan pemerataan itu tidak dapat menghilangkan adanya kemiskinan struktural. Perbedaan antara si kaya dan si miskin senantiasa akan ada, mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya tetap menikmati kekayaannya.

Menurut pendekatan struktural (Soetjatmoko, 1984) faktor penyebabnya ada pada kungkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan dalam ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemlaratan. Ketergantungan yang selama ini yang berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin dalam dunia hubungan sosial antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Mereka tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Maka jelaslah dari gambaran diatas bahwa dalam kemiskinan struktural golongan miskin tidak hanya memerlukan pengadaan kredit dan fasilitas-fasilitas lain. Yang perlu dirubah ialah struktur sosial, keadilan, kedaulatan

hukum, struktur-struktur yang membuat mereka terus-menerus tergantung dari pihak-pihak lain dan terus dieksploitasi oleh pihak-pihak itu. Pada penelitian kali ini peneliti ingin membahas spesifik tentang penggambaran kemiskinan struktural dalam film *Turah*. Film ini mempresentasikan kejujuran warga yang melawan ketidakadilan dalam pekerjaannya yang sudah belasan tahun bekerja dengan upah yang rendah. Peneliti memilih film "*Turah*" Karena kemiskinan yang terbentuk oleh tatanan sistem penguasa terhadap ketidak-adilan.

Gambar I.1. Poster Film Turah.



Sumber : <https://www.imdb.com/title/tt7407168/>

Peneliti beranggapan bahwa film *Turah* merupakan film yang paling cocok untuk diteliti, jika objek penelitiannya adalah penggambaran kemiskinan struktural dalam film.

Gambar I.1.2 Scene Jadag dan Turah bercerita keluh kesah mereka



Sumber : www.iflix.com

Dalam scene tersebut memperlihatkan Jadag tak terima bahwa tanah kelahirannya di kuasai juragan Darso, sebab Darso memperkerjakan warga kampung Tirang sebagai budak dan memberi upah rendah. Ia mengatakan “*Belasan tahun bekerja tetap saja menjadi kuli*” Jadag menilai apa yang dilakukan juragan adalah tindakan sewenang-wenang. Menurutnya, juragan memanfaatkan warga kampung demi kepentingan sendiri memperkaya diri dilihat dari teks “*Labanya masuk ke kantong pikel*”

Kenyataannya segelintir kaum elite politik bekerja sama dengan kamu pembisnis secara sengaja menciptakan struktur kemasyarakatan dengan menjauhkan kaum miskin dari berbagai sumber daya yang seharusnya dilawan. Pembahasan kemiskinan struktural penting dilakukan untuk upaya mengatasi ketimpangan masyarakat kelas bawah. Perkampungan kumuh dengan mudahnya digusur agar lahannya dapat digunakan sebagai pertokoan modern, perumahan mewah dan pabrik. Oleh karena kemiskinan, mereka tidak dapat membayar pengacara untuk membela kepentingannya. Tidak heran mereka terus menerus berada dala posisi terancam dan tidak aman. (Panjaitan, 2003)

Gambar I.1.3 Scene Jadag tak terima dengan sikap pikel



Scene ini memperlihatkan Jadag tak terima atas upah yang diberikan rendah oleh pikel. Juragan Darso mempercayakan pikel sebagai kepercayaannya

mengurus warga kampung Tirang. Jadag sudah belasan tahun bekerja sebagai kuli dan tidak mengalami kenaikan upah dan hidupnya berantakan. Pekel sudah tiga tahun bekerja sudah mempunyai rumah sendiri dan tanah, apa karena pekel orang berpendidikan?.

Seseorang tidak menjadi miskin bila memperoleh kesempatan. Persoalannya ialah bagaimana kaum miskin dapat memperoleh kesempatan, jika orang-orang yang mempunyai posisi istimewa menghalangi mereka? Orang yang menghalangi dan tidak memberikan kesempatan bagi kaum miskin merupakan sumber ketidakadilan. Kaum miskin yang berjuang dalam memperbaiki kehidupan mereka bukanlah peminta-minta. Menerima ketidakadilan secara pasrah sama saja dengan mengatakan kepada kaum penguasa bahwa tindakannya benar. Sikap pasrah dapat ditafsirkan sebagai bukti kerendahan martabat masyarakat miskin. (Panjaitan, 2003) Yang perlu diprioritaskan ialah pemerataan kesempatan kerja yang dapat memberikan penghasilan cukup untuk hidup layak, tetapi bukan hanya meratakan. Memperbanyak jumlah kesempatan kerja dengan membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan-pekerjaan baru.

Media merupakan jembatan antara publik dan realita, sebab masyarakat tidak mungkin merasakan secara langsung semua kejadian yang terjadi di dunia. Media menjadi sumber yang diandalkan untuk mengetahui hal-hal tertentu. Media juga berperan untuk menjadikan kemiskinan dan fenomena di masyarakat sebagai alat untuk mempertegas kekuasaannya di dalam masyarakat. Media massa menjadi agen strukturasi politik untuk melanggengkan status kaum kapitalis dan penguasa. Fakta dan penderitaan yang selalu ada dan dialami masyarakat bahwa benarkah kemiskinan adalah sebuah fenomena. karena

dalam konteks kebijakan, pembangunan karakter hingga tata laksana program pengentasan kemiskinan para pihak memiliki kepentingan saling berlomba untuk mempertahankan dan mengkristalkan kemiskinan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Kemiskinan dan rakyat miskin ialah komoditas media massa untuk meningkatkan rating dan posisi tawar media massa itu sendiri dan rakyat adalah objek untuk mencapai tujuan.

Sebenarnya banyak film tentang kemiskinan di Indonesia, baik yang ditunjukkan dengan gamblang, maupun yang hanya ditunjukkan secara simbolik di beberapa adegan. Seperti film “*Denias, Senandung diatas Awan*” menunjukkan anak dari keluarga miskin bertempat tinggal di suku borneo daerah Papua, yang bercita-cita ingin bersekolah, namun semangatnya untuk bersekolah tak didukung orang tuanya dan dilarang untuk bersekolah lebih baik membantu bapak dirumah. Sebab daerahnya tak ada lembaga resmi dan layak untuk dijadikan tempat belajar mengajar. Ia tetep semangat bersekolah walaupun bersembunyi-sembunyi dengan meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya. Sama dengannya Film “*Laskar Pelangi*” menunjukkan kemiskinan yang terjadi karena tidak mendapat fasilitas yang memadai dalam bidang pendidikan dengan sekolah berdinding papan kayu, beralaskan tanah, beratap bolong-bolong yang dibangun atas jiwa ikhlas dan kepeloporan dua orang guru berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok. Dua orang guru mengajarkan kesebelas muridnya yang diberi nama Laskar Pelangi agar mau sekolah, percaya diri , menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan. Ataupun juga film “*Alangkah Lucunya Negeri Ini*” menceritakan anak muda bernama Muluk lulusan sarjana S1 Managemen yang bertemu salah satu pimpinan anak kecil pencopet, Mereka

menghasilkan kesepakatan bahwa Muluk mengelola keuangan mereka yang tujuan Muluk agar hasil copet mereka dapat dijadikan modal usaha agar tidak mencopet lagi. Muluk menyadari bahawa anak-anak ini juga butuh pendidikan, Muluk juga memberikan pengarahan bahwa bagaimana mereka harus mencari uang dengan halal. Betapa pentingnya pendidikan dalam merubah kehidupan menjadi lebih baik. Pendidikan sangat penting dalam melepaskan seseorang dari kebodohan dan kemiskinan.

Masyarakat miskin umumnya berpendidikan rendah, sebab waktu mereka habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa waktu untuk belajar. Begitu pula dengan anak-anak mereka yang harus membantu orang tua untuk mencari penghasilan tambahan. Mereka memiliki kemampuan usaha yang lemah dan kesempatan yang terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mereka akan jauh dari masyarakat lain yang berpotensi lebih tinggi. Kaum miskin berada pada posisi yang lemah dan sering dilecehkan. Mereka percaya bahwa meskipun mereka telah menjadi sapi perah, mereka masih hidup di kaum penguasa, mereka tidak punya hak untuk melawan. Mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan dikampung mereka sendiri. Kemiskinan terjadi karena tidak adanya kesempatan bagi orang yang tidak berpendidikan untuk mendapat kesempatan kerja yang lebih baik.

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan oleh aktifis, mahasiswa dan lembaga sosial dalam penelitian seperti ini. Pertama penelitian oleh Nurhidayahtul Khasanah tahun 2018 tentang analisis terhadap kemiskinan dalam film "*Laskar Pelangi*" karya Andrea Hirata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi hak bagi seseorang yang punya seolah-olah tidak berhak bagi kaum yang miskin untuk mengenyam pendidikan,

melalui pendidikan manusia menjadi mengerti arti hidup dan meraih impian. Masalah sosial khususnya kemiskinan terjadi karena tidak mendapat fasilitas yang memadai dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan keadilan.

Kedua, penelitian oleh Mochamad Syawie dalam jurnalnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011 mengatakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masalah kemiskinan saat ini bukan lagi hanya kekurangan pangan tetapi pada tingkat yang sama kehabisan dan kekurangan makanan, sedangkan masalah ketimpangan disebabkan dengan akses yang tidak setara ke sumber daya ekonomi.

Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami kemiskinan struktural yang digambarkan dalam film tersebut. Studi sebelumnya lebih fokus pada kesenjangan pendidikan, kemiskinan dan ketimpangan sumber daya ekonomi. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan dari luar individu atau kelompok dalam masyarakat. Alasan utamanya adalah asalnya, sehingga dapat ditemukan dalam struktur sosial yang berlaku di masyarakat.

Kemiskinan semacam ini masih terjalin dalam masyarakat, sehingga mereka (orang miskin) tampak tidak berdaya dan tidak mampu memperbaiki taraf hidupnya (Suyanto, 2013: 9-10). Penelitian ini merupakan penelitian yang sama yang mengkaji topik kemiskinan, namun penelitian ini penting karena berusaha untuk melihat dan menemukan gambaran kemiskinan struktural dalam

film "*Turah*" yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

Untuk mengkaji film tersebut digunakanlah semiotika dengan melihat tanda yang ada dalam film. Komunikasi secara sederhana diartikan sebagai proses per-tukaran informasi, dimana informasi tersusun dari tiga unsur yaitu tanda, bahasa dan wacana (Vera , 2014, hlm.7).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Penggambaran Kemiskinan Struktural dalam film *Turah*?"

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kemiskinan struktural yang digambarkan dalam film *Turah*.

I.4 Batasan Masalah

1. Subjek dari penelitian ini adalah film *Turah*.

Objek dari penelitian ini adalah fokus kepada penggambaran kemiskinan struktural dalam film *Turah*.

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis semiotika C.S. Pierce

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian teoritis dalam pengembangan disiplin ilmu serta dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa—khususnya yang menggunakan metode analisis semiotika C.S.Pierce

I.5.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan banyak mahasiswa atau masyarakat yang dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan tentang bagaimana kemiskinan struktural yang dapat di gambarkan dalam satu film.

I.5.3 Manfaat Sosial

Manfaat sosial dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada publik sebagai pembuatan informasi yang jelas, bermakna dan mudah di ingat khalayak. Informasi yang timbul di media online kemungkinan lebih diterima oleh khalayak sebab pembaca merasa tertarik membaca dan juga mengakses lebih dari satu kali.